

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak belum dapat terhindar dari masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat didefinisikan ketika seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan ada berbagai macam penyebab, salah satunya adalah masalah rendahnya tingkat penghasilan yang diperoleh (Isnaini, 2017). Seluruh program kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat. Berdasarkan data dari BPS persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 di Indonesia mencapai 9,41 persen atau sekitar 25,14 juta orang. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan dukungan dari sub-sistem lain. Dukungan dari sub-sistem sangat dibutuhkan agar manfaat pemberdayaan masyarakat dapat semakin berdaya guna dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat (Fitriasari, 2016).

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan analisis yang tepat dan melibatkan seluruh komponen permasalahan dan diperlukan strategi penanganan yang tepat dan berkelanjutan. Berlandaskan pada prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah yaitu kabupaten atau kota dan provinsi telah diberi kewenangan secara otonom untuk mengelola daerahnya dalam bidang pemerintahan. Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan

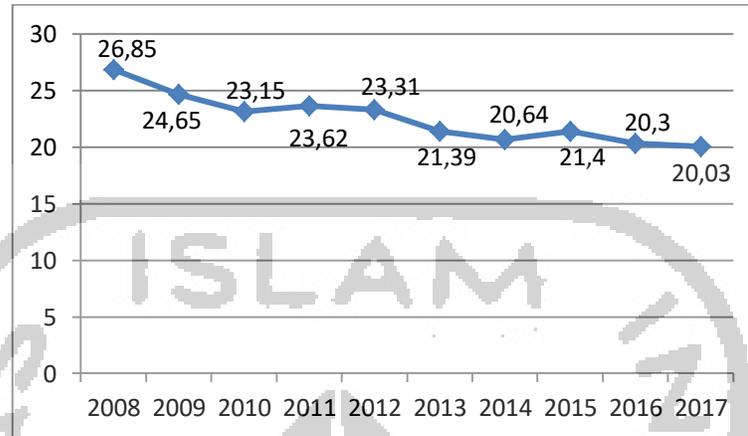
inovasi sebagai perwujudan Pemerintah Daerah dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal.

Menurut data BPS, pada tahun 2012 sebelum adanya kebijakan gerakan “Bela Beli Kulon Progo”, Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi yaitu sekitar 23,31% dibandingkan dengan wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Gunung Kidul sekitar 22,72%, Sleman 10,44%, Bantul 16,97%, dan Kota Jogja 9,38%. Berdasarkan pada data kemiskinan tahun 2012 di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Kulon Progo memiliki keinginan untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dibanding dengan daerah lain wilayah DIY dan dapat membuat masyarakatnya sejahtera (Susilo & Rijanta, 2016). Pada tahun 2018, setelah adanya kebijakan Gerakan “Bela Beli Kulon Progo”, Kabupaten Kulon Progo masih menjadi kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi sekitar 18,30% jika dibandingkan lagi dengan wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Gunung Kidul 17,63%, Sleman 7,65%, Bantul 13,43%, dan Kota Jogja memiliki tingkat kemiskinan paling rendah sekitar 6,98%. Namun, ada penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dari 23,31% pada tahun 2012 menurun menjadi 18,30% pada tahun 2018.

Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo mempunyai komitmen terhadap pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, kepentingan dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu Kabupaten Kulon Progo memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang Sehat, Mandiri, Berprestasi, Adil, Aman, dan Sejahtera Berdasarkan Iman dan Taqwa”. Visi ini dimaknai dengan tujuan untuk mewujudkan Kulon Progo yang sehat, mandiri dan berprestasi menuju masyarakat yang adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa. Salah satu upaya pemerintah demi terlaksananya visi tersebut adalah mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” yang diluncurkan pada tanggal 25 Maret 2013. Gerakan ini dibentuk dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 117 Tahun 2013 sebagai konsep aplikatif untuk menumbuh-kembangkan aktivitas perekonomian masyarakat Kulon Progo menuju tatanan perekonomian rakyat mandiri. Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” bertujuan untuk membangun kepercayaan publik tentang potensi Kulon Progo melalui beberapa program kegiatan yaitu Motif Batik Khas Kulon Progo (Batik Geblek Renteng), Beras Daerah (Rasda), Air Minum Kemasan (Air-Ku), dan Toko Milik Rakyat (ToMiRa) (Wardoyo, 2016). Dalam penelitian ini, penulis fokus pada tiga program yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti Motif Batik Khas Kulon Progo (Batik Geblek Renteng), Beras Daerah (Rasda), dan Toko Milik Rakyat (ToMiRa).

Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” dimaksudkan untuk mengangkat perekonomian daerah dengan langkah menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di pasar sendiri di tengah gempuran produk asing. Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” merupakan salah satu program yang berpihak kepada masyarakat miskin. Program ini mengajak masyarakat untuk membeli produk-produk lokal yang diproduksi oleh masyarakat Kulon Progo dan sebagai upaya dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo angka kemiskinan dalam rentan waktu 2008-2017 ditunjukkan dalam Gambar 1.1



Gambar 1.1 Grafik Angka Kemiskinan Tahun 2008-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Kulon Progo

Beberapa program penanggulangan kemiskinan sebelum adanya Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo pada tahun 2008 – 2012 seperti: pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PKK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan, sudah sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD). Meskipun, penurunan tingkat kemiskinan pada masa tersebut relatif naik turun. Pada tahun 2013 – 2017 merupakan implementasi dari Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo sebagai usaha dari penanggulangan kemiskinan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Jika diamati grafik pada gambar 1.1 bahwa sejak tahun 2013, setiap tahun angka kemiskinan relatif menurun meskipun pada tahun 2015 angka kemiskinan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Kemandirian ekonomi telah menjadi tuntutan yang harus segera diwujudkan. Ketergantungan pada pihak luar akan menjadi penyebab seseorang atau keluarga untuk tidak menjadi mandiri dalam perekonomian keluarganya. Kemandirian ekonomi dapat diartikan sebagai keluarga,

masyarakat maupun bangsa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak tergantung pada pihak luar. Suatu kelompok masyarakat dikatakan memiliki jati diri ketika memiliki karakter yang kuat dan memiliki kemandirian ekonomi (Shomedran, 2009).

Konsep kemandirian menjadi sangat penting dalam pembangunan, karena kemandirian merupakan suatu sikap yang mengutamakan kemampuan sendiri dalam menghadapi berbagai masalah untuk mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kerjasama yang saling menguntungkan. Sebagai implikasi dari berkaitannya unsur-unsur dalam konsep kemandirian, maka program dari pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam bidang ekonomi harus bisa membuat program yang tepat sasaran untuk masyarakat menengah kebawah. Program ini harus mengikutsertakan golongan menengah ke bawah untuk bisa ikut berpartisipasi, baik itu pada tingkat implementasi ataupun tingkat pengambilan keputusan, sehingga jadinya mereka memiliki landasan bagi terbentuknya *self-management* (Mukeri, 2012).

Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan kehidupan masyarakatnya di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi yang merupakan tulang punggung kehidupan. Islam memandang bahwa kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan secara menyeluruh. Syariat Islam telah mengklasifikasikan tiga aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraannya yakni kebutuhan (*dharuriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyah*), dan kemewahan (*tahsiniyah*). *Dharuriyah* adalah kemaslahatan yang paling esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik untuk akhirat maupun duniawi (Fitriasari, 2016).

Seorang muslim tidak boleh menggantungkan sumber kehidupan kepada orang lain terus menerus. Dalam agama Islam telah diajarkan bahwa seorang

muslim harus berusaha mencari nafkah dengan jalan yang halal. Dari nafkah halal tersebut bisa memberi nafkah untuk keluarganya serta bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Apapun pekerjaannya asalkan sesuai dengan prinsip syariah, maka pekerjaan tersebut perlu untuk ditekuni. Dalam Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat At-Taubah 105 menjelaskan bahwa setiap manusia harus bekerja:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ اَعْلَامِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [٩:١٠٥]

Artinya: *“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”* (QS. At-Taubah (9) : 105).

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya ada ancaman dari Allah SWT terhadap orang-orang yang menyalahi perintah-perintahNya. Jika dikaitkan dengan kemandirian ekonomi adalah bahwa Allah SWT memberikan manusia anugerah berupa sumber kehidupan dan menyuruh manusia untuk tetap bertawakal dan bersyukur kepada Allah SWT. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan apa yang telah dilakukannya yaitu manajemen dalam hidup yang tidak melanggar ketentuan syariat.

Kemandirian ekonomi yang ditekankan syariat adalah kemauan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja keras agar dapat terhindar dari sikap meminta-minta. Dalam ajaran Islam, perilaku meminta-minta adalah pekerjaan yang hina dan harus di jauhi, kecuali dalam keadaan terpaksa. Islam tidak melarang umatnya untuk menerima pemberian dari orang lain, akan tetapi menjadi pemberi jauh lebih dan mulia dibanding dengan meminta. Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ تُشْجَرُونَ [١٧:١٥]

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”*. (Al- Mulq: 15).

Dalam ayat di atas menjelaskan ajakan kepada umat manusia secara umum dan umat muslim secara khusus agar bisa memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi setelahnya. Allah SWT memerintahkan manusia agar mampu berusaha dan mengelola alam untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh rezeki yang halal. Hal ini menandakan bahwa Allah SWT tidak menyukai orang yang memiliki sifat pemalas. Karena Allah SWT lebih menyukai orang yang berusaha dan mencari rezeki, karena hal itu termasuk ibadah (Shihab, 2012). Al-Qardhawi menjelaskan bahwa dalam Islam, tidak dibenarkan seseorang hidup dalam kondisi miskin dan berusaha agar tidak terjerumus dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, melindungi kestabilan serta ketentraman masyarakat, di samping mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat (Qardhawi, 2002).

Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” memiliki empat gagasan yang saling terkait antara satu sama lain. Keempat gagasan tersebut adalah: Pertama, gerakan “Bela Beli Kulon Progo” dapat menumbuhkan rasa bangga dan cinta bagi masyarakat terhadap produk-produk lokal. Kedua, gerakan menciptakan pasar serta menggalakan produk-produk unggulan daerah. Ketiga, mengadakan gerakan hidup sederhana yang dapat menekan pengeluaran yang tidak penting. Keempat, gerakan kesadaran akan pentingnya kepedulian sosial serta gotong royong di tengah masyarakat. Keempat gagasan ini tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berkontribusi secara

nyata dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat memenangkan persaingan pasar bebas (Wardoyo, 2016). Gerakan Bela Beli Kulon Progo dimaksudkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat Kulon Progo akan kecintaan, kepedulian, dan keberpihakan terhadap produk-produk lokal dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi lokal Kulon Progo.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menjadi tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini karena ingin mengulas mengenai konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” serta bagaimana caranya mewujudkan kemandirian ekonomi berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi diantara daerah yang berada di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada tahun 2012. Maka dari itu, pemerintah daerah pada tahun 2013 membuat kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui gerakan “Bela Beli Kulon Progo” yang bertujuan untuk membangun kepercayaan publik tentang potensi Kulon Progo dan menjadikan produk lokal menjadi tuan rumah sendiri di tengah gempuran produk asing. Gerakan ini berbasis pemberdayaan masyarakat dengan gagasan melakukan perubahan dari tingkat bawah dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat ?

2. Bagaimana kemandirian ekonomi masyarakat Kulon Progo setelah adanya Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo ?
3. Bagaimana Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo berdasarkan pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif Ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Untuk menganalisis kemandirian ekonomi masyarakat Kulon Progo setelah adanya Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo
3. Untuk menganalisis Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo berdasarkan pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Gerakan Bela Beli Kulon Progo terutama pada pemerintahan daerah Kulon Progo.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini sebagai bahan untuk memperdalam teori-teori terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kemandirian ekonomi dalam aplikasinya di pemerintahan.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi peningkatan daya kritis masyarakat dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah atau kepala daerah agar dapat membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan pada penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi tentang telaah pustaka dan pembahasan teori yang terkait dengan objek penelitian yang bersifat teoritis yang berisi tentang kebijakan pemerintah dalam Islam, Gerakan “Bela Beli Kulon Progo, kemiskinan dalam Islam, pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Islam, dan kemandirian ekonomi dalam Islam

Bab Ketiga membahas metode penelitian yang berisi tentang desain penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, obyek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi konseptual variabel dan definisi operasional variabel, instrumen penelitian yang digunakan serta teknik analisis data.

Bab Keempat merupakan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian. Pada bab ini dipaparkan gambaran umum Kabupten Kulon Progo, gambaran umum Gerakan Bela Beli Kulon Progo, implementasi Gerakan Bela Beli Kulon Progo dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam Gerakan Bela Beli Kulon Progo berdasarkan perspektif ekonomi Islam, kemandirian ekonomi masyarakat Kulon Progo, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Saran adalah masukan yang diberikan untuk pelaksana program Gerakan Bela-Beli Kulon Progo beserta pihak-pihak yang terkait.